

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan ini disusun dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang diberikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2024. Kinerja yang diukur dalam LPPD ini didasarkan atas dokumen Renstra, dengan mengacu kepada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi :

- Sub Urusan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
- Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan kabupaten/kota mencakup penyelenggaraan PSU perumahan.
- Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Permasalahan Strategis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata, berdasarkan telaahan terhadap Renstra yaitu belum optimalnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan

permukiman yang layak, hal ini berkaitan dengan Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 1 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Program Kawasan Permukiman;
- e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- f. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terhadap Telaahan RTRW struktur ruang wilayah direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi yang ada di wilayah ini. Penatagunaan ruang yang berskala internal kabupaten/ kota diserahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada kabupaten/kota masing-masing, sehingga dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yaitu :

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman,
- Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman,
- Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kepulauan selayar bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang belum merata menyebabkan adanya kesenjangan antar

wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah perumahan dan kawasan permukiman.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur perumahan mencakup antara lain belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dimana aplikasi yang digunakan saat ini dari pemerintah antara lain e-RTLH melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), aplikasi SIBARU untuk Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Perumahan. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur kawasan permukiman antara lain masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata dan masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota, belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman, belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan dan drainase lingkungan di kawasan permukiman.

Permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dimana rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata akan memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada rumah tangga yang tidak menggunakan sanitasi

yang layak karena sangat berpengaruh sekali dalam penurunan tingkat kesehatan di masyarakat. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun permasalahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Perumahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi 2. Belum adanya ketersediaan lahan untuk relokasi 3. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar 4. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan 5. Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2.	Permasalahan dalam Bidang Kawasan Permukiman	1. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata 2. Penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh bukan menjadi kewenangan kabupaten/kota 3. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman 4. Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi dan air limbah di kawasan permukiman.
3.	Permasalahan dalam bidang	1. Masih sulit dan terbatasnya pemenuhan air bersih di beberapa pulau di wilayah

No.	Aspek	Permasalahan
	Prasarana Sarana Umum	Kepulauan 2. Belum adanya database prasarana, sarana dan utilitas dalam rangka pencapaian tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terletak pada titik koordinat -5.90973,121.36036, yang beralamat di Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 21313 Benteng Kepulauan Selayar, Email : diperkimdpkp@gmail.com.



Visi dan Misi Kepala Daerah

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dengan visi “Selayar sebagai Kabupaten

Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim
Kawasan Timur Indonesia”**

Rumusan Pemaknaan Visi :

- **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.
- **Kawasan Indonesia Timur** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/ kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah: 1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan; 4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
 - b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
 - c. Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - d. Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi - Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;
 - b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
 - c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
 - d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
 - e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
 - f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
 - g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
 - a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
 - b. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
 - c. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - d. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Misi

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. misi Kepulauan Selayar disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Kepulauan Selayar sebagai **Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang berbasis maritim meliputi :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dari keenam Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. Misi Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur baik prasarana dan sarana yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

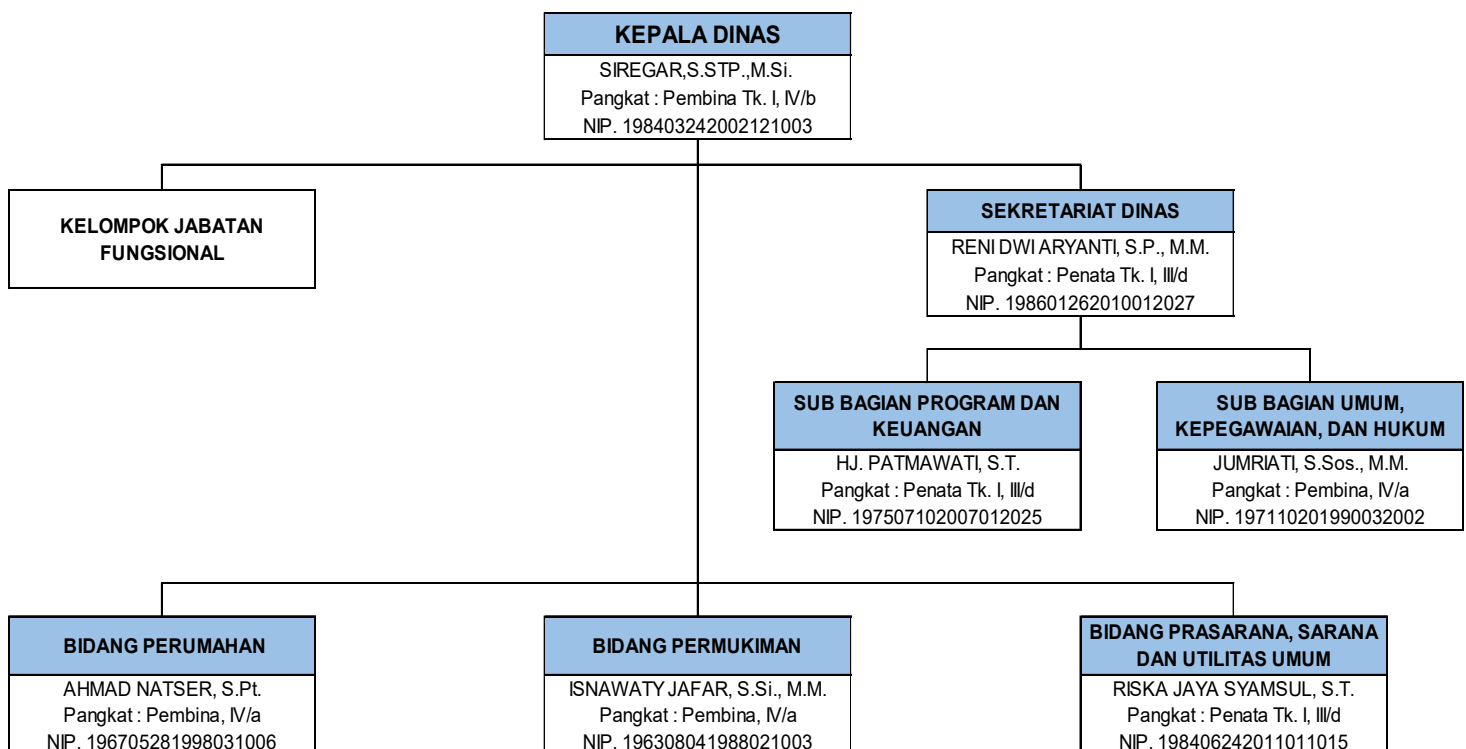
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	- Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perkim - Laporan Keuangan Dinas Perkim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Perkim (%)
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	- Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) - Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan	- Rasio Rumah Layak Huni - Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan
- d. Bidang Permukiman
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kawasan permukiman,
- b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
- c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak dan Jabatan Struktural Yang Belum Terisi**a. Jumlah Aparatur Sipil Negara**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2024 sebanyak 25 orang. Berdasarkan Golongan jabatan pada satuan kerja ini lebih didominasi golongan III sebanyak 18 orang atau 72% dari total pegawai yang ada.

Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 18 orang atau dengan persentase 72%,

setelah itu untuk tingkat pendidikan SMA berjumlah sebanyak 3 orang atau 12%, 4 orang untuk tingkat pendidikan Magister (S2) atau dengan persentase 16% artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Potensi SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan Tabel 1.4.

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Jabatan
Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
I	0	0	0
II	2	1	3
III	7	11	18
IV	2	2	4
Total	11 orang	14 orang	25 orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	-
SMA	3 Orang
Diploma	-
S1	18 Orang
S2	4 Orang
S3	-
Total	25 Orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

b. Data Jabatan Struktural

Data jabatan struktural pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2024 sebanyak 7 orang, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perumahan, Kepala Bidang Permukiman, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

c. Data Jabatan Fungsional

Data jabatan fungsional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2024 sebanyak 15 orang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini berdasarkan nomenklatur jabatannya.

Tabel 1.5
Jumlah Jabatan Fungsional

No.	Nomenklatur Jabatan	Jumlah
1.	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda	4 Orang
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1 Orang
3.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pratama	3 Orang
4.	Penelaah Teknis Kebijakan	4 Orang
5.	Pengawas Jaringan Utilitas	1 Orang
6.	Teknisi Sarana dan Prasarana	2 Orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

d. Jumlah Tenaga Kontrak

Jumlah Tenaga Kontrak dilihat dari tingkat pendidikannya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2024 sebanyak 43 orang.

Tabel 1.6

Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	1 Orang
SMA	22 Orang
Diploma	-
S1	20 Orang
S2	-
S3	-
Total	43 Orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

e. Jabatan Struktural yang Belum Terisi

Tidak terdapat Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum terisi.

1.5. Inovasi

NO.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1.6. Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Piagam/Penghargaan Pemerintah				√	Pemerintah Kabupaten	

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Penghargaan Kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Atas Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas Diberikan pada Rapat Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022					Kepulauan Selayar	
2.	Piagam Penghargaan Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Kategori "Inisiasi dalam Manajemen Risiko"				√	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	PERUMAHAN RAKYAT						
		158	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		579 Unit	DPKP	
		159	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		-	-	
		160	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		-	-	
		161	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		-	-	
		162	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		-	-	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		163	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			-	-	Tidak ada warga negara yang direlokasi sebagai akibat dari program Pemerintah Daerah Kab/Kota
		164	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			-	-	Tidak ada unit rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana
		165	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi			-	-	
		166	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan			-	-	Belum ada lokasi pencadangan lahan
		167	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang			-	-	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM					
		168	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			-	-	Seluruh penerima layanan merupakan pemilik sah atas tanah dan bangunan
		169	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			-	-	Belum pernah dianggarkan
		170	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			-	-	
		171	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan			-	-	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			rencana pemenuhan SPM					
		172	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			-	-	Belum ada anggaran untuk sub kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
		173	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha			211,46 Ha	DPKP	
		174	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH			151 Unit	DPKP	
		175	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh			65,74 Ha	DPKP	
		176	Jumlah rumah di kab/kota			35.706 Unit	DPKP	
		177	Jumlah unit PK RTLH			-	-	Belum ada data PK RTLH
		178	Jumlah rumah tidak layak huni			13.107 Unit	DPKP	
		179	Jumlah rumah yang tidak dihuni			-	-	Tidak dilakukan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
								Pendataan
		180	Rasio rumah dan KK			0,63	DPKP	
		181	Jumlah rumah pembangunan baru			-	-	
		182	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU			-	-	Belum ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang atau developer yang terfasilitasi PSU
		183	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum			-	-	Belum ada kegiatan terkait fasilitasi air minum
		184	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan			-	-	Belum ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
								atau developer yang terfasilitasi jalan lingkungan
		185	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)			-	-	Belum ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang atau developer yang terfasilitasi akses sanitasi
		186	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH			-	-	Tidak ada kegiatan terkait RTNH
		187	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU			-	-	Tidak ada rumah yang terfasilitasi akses PJU
		188	Jumlah pengembang yang tersertifikasi			-	-	Tidak adanya pengembang yang memenuhi

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
								kriteria untuk penerbitan sertifikat sebagai acuan permintaan bantuan PSU Perumahan
		189	Jumlah pengembang yang terregistrasi			-	-	Tidak ada pengembang yang teregistrasi
		190	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan			-	-	Tidak ada pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perumahan Rakyat						
		28	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		-	-	Tidak ada rumah korban bencana yang ditangani
		29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		-	-	Tidak ada rumah yang terkena dampak relokasi program pemerintah

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100 \%$		$\frac{65,74 \text{ Ha}}{211,46 \text{ Ha}} \times 100 \%$ $= 31,09 \%$	DPKP	
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100 \%$		$\frac{13.107 \text{ Unit}}{35.706 \text{ Unit}} \times 100 \%$ $= 36,71 \%$	DPKP	
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah satuan perumahan}} \times 100 \%$			-	Tidak ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang atau developer

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 tidak mengelola program dan kegiatan berdasarkan urusan.

2.4. Capaian Indikator Komponen Otonomi Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 tidak mengelola program dan kegiatan berdasarkan komponen otonomi daerah.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 3.1. Dasar Hukum
- 3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan
- 3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
 - 1. Target Kinerja
 - 2. Realisasi Kinerja
- 3.4. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
- 3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengelola tugas pembantuan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, yakni secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel;
2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni;
3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan; dan

4. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja kegiatan untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Benteng, 24 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR,**

SIREGAR, S.STP., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19840324 200212 1 003